



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1005 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2017
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017, telah ditetapkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang mobilitas dan pemenuhan unsur kepatutan serta kewajaran maupun rasionalitas dalam pemberian biaya perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

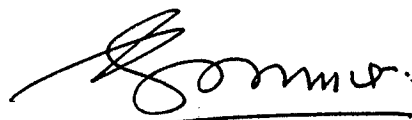
Lampiran I dan Lampiran IV Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri diubah serta disisipkan diantara Lampiran IV dan Lampiran V yakni Lampiran IVA sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV dan Lampiran IVA Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

 Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1005 TAHUN 2017
Tanggal 23 Mei 2017

A. DAFTAR SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TUJUAN SELURUH PROVINSI DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KECUALI PROVINSI BANTEN DAN JAWA BARAT

No	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.000.000	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	4.500.000	dibayarkan secara lumpsum
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	4.000.000	
4	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	Orang/Hari	2.500.000	
5	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol III	Orang/Hari	2.000.000	
6	Pegawai Gol II, Gol I, PPPK dan Bukan Pegawai	Orang/Hari	1.000.000	

B. DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS TUJUAN PROVINSI BANTEN DAN JAWA BARAT

No	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	2.500.000	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	2.000.000	dibayarkan secara lumpsum
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1.500.000	
4	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	Orang/Hari	1.000.000	
5	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol III	Orang/Hari	750.000	
6	Pegawai Gol II, Gol I, PPPK dan Bukan Pegawai	Orang/Hari	500.000	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1005 TAHUN 2017
Tanggal 23 Mei 2017

DAFTAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
KE WILAYAH KOTA/KABUPATEN BANTEN DAN JAWA BARAT

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Satuan Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kota Bekasi	141.716	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang dibayarkan secara lumpsum
2	Kabupaten Bekasi	224.550	
3	Kabupaten Bogor	324.849	
4	Kota Bogor	299.899	
5	Kota Depok	146.207	
6	Kota Tangerang	155.189	
7	Kota Tangerang Selatan	173.153	
8	Kabupaten Tangerang	249.001	
9	Kota Bandung	743.510	
10	Kota Serang	399.200	
11	Kab. Bandung	889.717	
12	Kab. Bandung Barat	839.817	
13	Kab. Ciamis	1.337.320	
14	Kab. Cianjur	528.940	
15	Kab. Garut	1.077.840	
16	Kab. Indramayu	908.180	
17	Kab. Karawang	350.797	
18	Kab. Kuningan	1.332.330	
19	Kab. Majalengka	1.267.460	
20	Kab. Pangandaran	1.672.149	
21	Kab. Purwakarta	479.539	
22	Kab. Subang	638.720	
23	Kab. Sukabumi	538.920	
24	Kab. Sumedang	993.010	
25	Kab. Tasikmalaya	1.272.450	
26	Kota Banjar	1.467.060	
27	Kota Cimahi	714.069	
28	Kota Cirebon	1.192.610	
29	Kota Sukabumi	538.920	
30	Kab. Lebak	568.860	
31	Kab. Pandeglang	543.910	
32	Kab. Cilegon	523.950	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Nomor 1005 TAHUN 2017
Tanggal 23 Mei 2017

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA PROVINSI KE KOTA
KABUPATEN DALAM PROVINSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN	KETERANGAN
	ACEH			Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Ibukota Provinsi ke Kota Kabupaten dalam Provinsi dibayarkan secara riil
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000	
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000	
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000	
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000	
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000	
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000	
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000	
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000	
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000	
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000	
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000	
12	Banda Aceh	Kab. Aceh Bener Merah	273.000	
13	Banda Aceh	Kab. Aceh Bireuen	220.000	
14	Banda Aceh	Kab. Aceh Gayo Lues	370.000	
15	Banda Aceh	Kab. Aceh Nagan Jaya	275.000	
16	Banda Aceh	Kab. Aceh Pidie	190.000	
17	Banda Aceh	Kab. Aceh Pidie Jaya	205.000	
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000	
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000	
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000	
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	259.000	
22	Medan	Kab. Batubara	225.000	
23	Medan	Kab. Dairi	270.000	
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000	
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000	
26	Medan	Kab. Karo	200.000	
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000	
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000	
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000	
30	Medan	Kab. Langkat	186.000	
31	Medan	Kab. Mandailing	420.000	
32	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000	
33	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000	
34	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000	
35	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000	
36	Medan	Kab. Samosir	330.000	
37	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000	
38	Medan	Kab. Simalungun	264.000	
39	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000	
40	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000	
41	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000	
42	Medan	Toba Samosir	300.000	
43	Medan	Kota. Binjai	180.000	
44	Medan	Kota. Pematang Siantar	225.000	
45	Medan	Kota. Sibolga	345.000	
46	Medan	Kota. Tanjung Balai	285.000	
47	Medan	Kota. Tebing Tinggi	203.000	
	RIAU			
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000	
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000	
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000	
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000	
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000	
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000	
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000	
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000	
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000	
56	Pekanbaru	Kab. Dumai	400.000	
	KEPULAUAN RIAU			
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000	
	JAMBI			
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000	
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000	

NO.	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN	KETERANGAN
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000	
61	Jambi	Kab. Merangin	360.000	
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000	
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000	
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000	
65	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000	
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000	
67	Jambi	Kab. Sungai Penuh	308.000	
SUMATERA BARAT				
68	Padang	Kab. Agam	225.000	
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000	
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000	
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000	
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000	
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000	
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000	
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000	
76	Padang	Kab. Solok	210.000	
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000	
78	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000	
79	Padang	Kota. Bukit Tinggi	215.000	
80	Padang	Kota. Padang Panjang	210.000	
81	Padang	Kota. Pariaman	200.000	
82	Padang	Kota. Payakumbuh	225.000	
83	Padang	Kota. Sawahlunto	215.000	
84	Padang	Kota. Solok	210.000	
SUMATERA SELATAN				
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000	
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000	
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000	
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000	
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000	
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000	
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000	
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000	
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000	
94	Palembang	Kab. Organ Komering Ulu Selatan	250.000	
95	Palembang	Kab. Organ Komering Ulu Timur	245.000	
96	Palembang	Kab. Pali	265.000	
97	Palembang	Kota. Lubuk Linggau	290.000	
98	Palembang	Kota. Pagar Alam	280.000	
99	Palembang	Kota. Prabumulih	205.000	
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000	
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000	
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000	
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000	
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000	
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000	
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000	
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000	
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000	
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000	
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000	
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000	
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000	
113	Bandar Lampung	Kota. Metro	234.000	
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000	
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000	
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	250.000	
117	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000	
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000	
119	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000	
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000	
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000	
122	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000	
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000	
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000	
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000	
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000	

NO.	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN	KETERANGAN
JAWA TENGAH				
149	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000	
150	Semarang	Kab. Banyumas	257.000	
151	Semarang	Kab. Batang	240.000	
152	Semarang	Kab. Blora	270.000	
153	Semarang	Kab. Boyolali	240.000	
154	Semarang	Kab. Brebes	263.000	
155	Semarang	Kab. Cilacap	280.000	
156	Semarang	Kab. Demak	230.000	
157	Semarang	Kab. Grobogan	235.000	
158	Semarang	Kab. Jepara	240.000	
159	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000	
160	Semarang	Kab. Kebumen	260.000	
161	Semarang	Kab. Kendal	230.000	
162	Semarang	Kab. Klaten	250.000	
163	Semarang	Kab. Kudus	235.000	
164	Semarang	Kab. Magelang	240.000	
165	Semarang	Kab. Pati	240.000	
166	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000	
167	Semarang	Kab. Pemalang	250.000	
168	Semarang	Kab. Prubalingga	270.000	
169	Semarang	Kab. Purworejo	250.000	
170	Semarang	Kab. Rembang	250.000	
171	Semarang	Kab. Semarang	230.000	
172	Semarang	Kab. Sragen	250.000	
173	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000	
174	Semarang	Kab. Tegal	260.000	
175	Semarang	Kab. Temanggung	240.000	
176	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000	
177	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000	
178	Semarang	Kota. Magelang	240.000	
179	Semarang	Kota. Pekalongan	245.000	
180	Semarang	Kota. Salatiga	235.000	
181	Semarang	Kota. Surakarta	245.000	
182	Semarang	Kota. Tegal	260.000	
D.I YOGYAKARTA				
183	Yogyakarta	Kab. Bantul	225.000	
184	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	210.000	
185	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	210.000	
186	Yogyakarta	Kab. Sleman	201.000	
JAWA TIMUR				
187	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000	
188	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000	
189	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000	
190	Surabaya	Kab. Gresik	225.000	
191	Surabaya	Kab. Jember	261.000	
192	Surabaya	Kab. Jombang	235.000	
193	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000	
194	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000	
195	Surabaya	Kab. Magetan	253.000	
196	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000	
197	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000	
198	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000	
199	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000	
200	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000	
201	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000	
202	Surabaya	Kab. Sampang	235.000	
203	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000	
204	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000	
205	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000	
206	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000	
207	Surabaya	Kab. Tuban	245.000	
208	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000	
209	Surabaya	Kota. Batu	242.000	
210	Surabaya	Kota. Blitar	255.000	
211	Surabaya	Kota. Bojonegoro	225.000	
212	Surabaya	Kota. Kediri	235.000	
213	Surabaya	Kota. Madiun	245.000	
214	Surabaya	Kota. Malang	228.000	
215	Surabaya	Kota. Mojokerto	225.000	
216	Surabaya	Kota. Probolinggo	228.000	
BALI				
217	Denpasar	Kab. Badung	188.000	
218	Denpasar	Kab. Bangli	225.000	

NO.	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN	KETERANGAN
219	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000	
220	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000	
221	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000	
222	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000	
223	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000	
NUSA TENGGARA BARAT				
224	Mataram	Kab. Lombok Barat	200.000	
225	Mataram	Kab. Lombok Tengah	210.000	
226	Mataram	Kab. Lombok Timur	240.000	
NUSA TENGGARA TIMUR				
227	Kupang	Kab. Belu	325.000	
228	Kupang	Kab. Kupang	175.000	
229	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000	
230	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000	
KALIMANTAN BARAT				
231	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000	
232	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000	
233	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000	
234	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000	
235	Pontianak	Kab. Landak	270.000	
236	Pontianak	Kab. Melawi	430.000	
237	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000	
238	Pontianak	Kab. Sambas	300.000	
239	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000	
240	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000	
241	Pontianak	Kab. Sintang	392.000	
242	Pontianak	Kota. Singkawang	257.000	
KALIMANTAN TENGAH				
243	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000	
244	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000	
245	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000	
246	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000	
247	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000	
248	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000	
249	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000	
250	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000	
251	Palangkaraya	Kab. Lumandau	525.000	
252	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000	
253	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000	
254	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000	
255	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000	
KALIMANTAN SELATAN				
256	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000	
257	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000	
258	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000	
259	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000	
260	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000	
261	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000	
262	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000	
263	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000	
264	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000	
265	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000	
266	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	225.000	
KALIMANTAN TIMUR				
267	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000	
268	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000	
269	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000	
270	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000	
271	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000	
272	Samarinda	Kab. Balikpapan	550.000	
273	Samarinda	Kab. Bontang	600.000	
SULAWESI UTARA				
274	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000	
275	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000	
276	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000	
277	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000	
278	Manado	Kab. Minahasa	180.000	
279	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000	
280	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000	
281	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000	
282	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000	
283	Manado	Kab. Kotamobagu	250.000	
284	Manado	Kab. Tomohon	170.000	

NO.	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN	KETERANGAN
GORONTALO				
285	Gorontalo	Kab. Boalemo	413.000	
286	Gorontalo	Kab. Gorontalo	190.000	
287	Gorontalo	Kab. Pahuwato	675.000	
SULAWESI BARAT				
288	Mamuju	Kab. Majene	240.000	
289	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000	
290	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000	
291	Mamuju	Kab. Mamaju Utara	270.000	
292	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000	
SULAWESI SELATAN				
293	Makasar	Kab. Banteang	235.000	
294	Makasar	Kab. Barru	210.000	
295	Makasar	Kab. Bone	240.000	
296	Makasar	Kab. Bulukumba	240.000	
297	Makasar	Kab. Enrekang	250.000	
298	Makasar	Kab. Gowa	175.000	
299	Makasar	Kab. Jeneponto	230.000	
300	Makasar	Kab. Luwu	350.000	
301	Makasar	Kab. Luwu Timur	375.000	
302	Makasar	Kab. Luwu Utara	365.000	
303	Makasar	Kab. Maros	170.000	
304	Makasar	Kab. Pinrang	230.000	
305	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000	
306	Makasar	Kab. Sinjai	235.000	
307	Makasar	Kab. Soppeng	235.000	
308	Makasar	Kab. Takalar	190.000	
309	Makasar	Kab. Tanatoraja	350.000	
310	Makasar	Kab. Toraja Utara	350.000	
311	Makasar	Kab. Wajo	230.000	
312	Makasar	Kota.Palopo	350.000	
313	Makasar	Kota.Pare-Pare	225.000	
SULAWESI TENGAH				
314	Palu	Kab. Buol	472.000	
315	Palu	Kab. Luwuk	387.000	
316	Palu	Kab. Morowali	380.000	
317	Palu	Kab. Morowali Utara	250.000	
318	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000	
319	Palu	Kab. Poso	280.000	
320	Palu	Kab. Sigi	219.000	
321	Palu	Kab. Tojouna-Una	340.000	
322	Palu	Kab. Konawe Utara	412.000	
SULAWESI TENGGARA				
323	Kendari	Kab. Bombana	355.000	
324	Kendari	Kab. Kolaka	370.000	
325	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000	
326	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000	
327	Kendari	Kab. Konawe	300.000	
328	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000	
329	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000	
MALUKU UTARA				
330	Sofifi	Kab. Halmahela Barat	850.000	
331	Sofifi	Kab. Halmahela Tengah	1.000.000	
332	Sofifi	Kab. Halmahela Timur	1.000.000	
333	Sofifi	Kab. Halmahela Utara	900.000	
PAPUA				
334	Jayapura	Kab. Jayapura	504.000	
335	Jayapura	Kab. Sarmi	2.650.000	
336	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000	
PAPUA BARAT				
337	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000	
338	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000	
339	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT